



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI  
DENGAN DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA (PERSERO)**

---

Tahun Sidang	: 2019 - 2020
Masa Persidangan	: I
Rapat	: Ke - 9 (Sembilan)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
Hari, tanggal	: Kamis, 28 November 2019
Sifat Rapat	: Terbuka
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d 18.05 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I
Acara	: 1. Laporan kegiatan Penugasan Pemerintah hingga Triwulan ke-3 Tahun 2019 2. Rencana Program Kerja Tahun 2020 3. Lain-lain
Ketua Rapat	: Sugeng Suparwoto (Ketua Komisi VII DPR RI/ F.P.Nasdem)
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti
Hadir Anggota	: 32 Orang dari 51 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI 3 Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin 16 Orang Anggota Komisi VII DPR RI tanpa keterangan.

**KESIMPULAN RAPAT**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada Hari Kamis, 28 November 2019 dibuka pukul 13.55 WIB yang dipimpin oleh Sugeng Suparwoto selaku Ketua Komisi VII DPR RI, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan acara:
  - a. Laporan kegiatan Penugasan Pemerintah hingga Triwulan ke-3 Tahun 2019
  - b. Rencana Program Kerja Tahun 2020
  - c. Lain-lain
3. Ketua Rapat menyampaikan, bahwa Komisi VII DPR RI ingin mendapat penjelasan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) diantaranya mengenai:
  1. Penyediaan dan pendistribusian BBM & LPG bersubsidi, realisasi dan prognosa diakhir Tahun 2019.
  2. Perkembangan pelaksanaan BBM satu harga
  3. Kendala dan dampak pelaksanaan BBM Penugasan pada Pertamina
  4. Perkembangan program RDMP (*Refinery Development Master Plan*) dan *Grass Root Refinery (GRR)*.
4. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) menyampaikan Kegiatan Penugasan Pemerintah sebagai berikut :
  - 1) Hilir
    - a) Penyaluran BBM & LPG  
Penyaluran BBM & LPG 2017-2019 Dan Outlook Kuota 2020
      1. BIOSOLAR JBT (Juta KL) Real Sep 2019 sebesar 11,86  
Prog 2019 sebesar 16,09
      2. KEROSENE JBT (Juta KL) Real Sep 2019 sebesar 0,40  
Prog 2019 sebesar 0,53
      3. PREMIUM JBKP (Juta KL) Real Sep 2019 sebesar 8,89  
Prog 2019 sebesar 12,10
      4. LPG 3 KG (Juta MT) Real Sep 2019 sebesar 5,09  
Prog 2019 sebesar 6,94

Ket: JBT: Jenis BBM Tertentu (Subsidi) JBKP: Jenis BBM Khusus Penugasan
    - b) Konversi BBM – LPG untuk Nelayan kecil Tahun 2019 sebesar 13.305 Paket 38 Kab/ Kota<sup>4</sup>
    - c) Konversi BBM – LPG untuk Petani Tahun 2019 sebesar 1.000 Paket 4 Kab/ Kota<sup>5</sup>

d) BBM 1 Harga

Target (Titik) 39 Tahun 2019

Realisasi (Titik) 37\* Tahun 2019

Realisasi Premium (KL) 134.522\*\* Tahun 2019

Realisasi BioSolar (KL) 55.521\*\* Tahun 2019

Ket :

\*Hingga Sep 2019

\*\*Prognosa

2) Infrastruktur

a) Implementasi Bio Diesel (B20 & B30)

b) Pembangunan Infrastruktur Tangki BBM & LPG

3) Kilang

a) Pengembangan Kilang

4) Jaringan Gas

Pengelolaan Jargas

Strategi Pelaksanaan Program Jargas sesuai Timeline di atas meliputi :

1. Mengusulkan Timeline pelaksanaan Program Jargas dapat ditetapkan sebagai Rencana Induk (Renduk) Program Jargas Nasional.
2. Mengutamakan pelaksanaan JargasAPBN sesuai penugasan Pemerintah di awal-awal tahun Timeline.
3. Menyusun perencanaan, sumber alokasi gas maupun potensi demand sesuai kota-kota penugasan Jargas.
4. Kerjasama dengan pihak-pihak terkait lainnya guna memperlancar kegiatan pembangunan, operasional dan penyaluran gas.

## II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VII DPR RI mendesak Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk menyampaikan laporan keuangan hingga triwulan ketiga tahun 2019, data tertulis mengenai volume, harga, nama importir, dan negara asal impor minyak mentah, BBM dan LPG tahun 2018-2019 serta data kuota BBM dan LPG 3 kg bersubsidi per provinsi tahun 2019 disampaikan pada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 5 Desember 2019.

 3

2. Komisi VII DPR RI mendesak Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk segera mengambil langkah konkrit untuk menyelesaikan permasalahan kelangkaan BBM bersubsidi yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.
3. Komisi VII DPR RI mendesak Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk membuat *roadmap* pengurangan jumlah impor BBM sehingga target impor produk BBM nol persen dapat tercapai di tahun 2026.
4. Komisi VII DPR RI mendorong Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk berkerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk mendukung upaya peningkatan cadangan Migas.
5. Komisi VII DPR RI mendorong Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk mengakselerasi peningkatan konsumsi CPO dalam negeri untuk mengurangi volume impor minyak mentah dan menjaga stabilitas harga CPO dalam negeri.
6. Komisi VII DPR RI meminta Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk membuat kajian solar bersubsidi dan distribusi LPG 3 kg secara tertutup dan memastikan pendistribusiannya tepat sasaran dan disampaikan pada Komisi VII DPR RI.
7. Komisi VII DPR RI meminta Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan pada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 5 Desember 2019.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 18.05 WIB

**DIREKTUR UTAMA  
PT PERTAMINA (PERSERO)**

**NICKE WIDYAWATI**

Jakarta, 28 November 2019  
**KETUA RAPAT,**

**SUGENG SUPARWOTO  
A-373**